

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam suatu penelitian, tentunya memiliki landasan atau dasar yang perlu digunakan sebagai acuan untuk mengkoreksi atau mengevaluasi penelitian. Sumber informasi yang dipakai penulis dari penelitian terdahulu mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan yang berguna bagi penulis. Beberapa penelitian yang membahas mengenai topik yang hampir sama antara lain:

- 1. Rachmawati and Anik (2020)** melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan" (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah, good governance dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas keuangan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif menggunakan data primer dengan menggunakan pengumpulan data kuesioner sebagai instrumen

penelitian dan populasinya adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Semarang dengan jumlah responden 120 orang yang diambil dengan menggunakan purposive sampling ada di (OPD) di Kabupaten Semarang.

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel menggunakan kriteria tertentu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen SAP berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan, hasil penelitian dari kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan hasil penelitian good govenance berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan hasil penelitian pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2. **Safitri Nur Ramadhani, Mahsuni Wahid Abdul (2020)** melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bima NTB) penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif menggunakan data primer digunakan untuk meneliti kualitas aparatur pemerintahan daerah dalam konteks mengelola keuangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan kualitas aparatur

pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan oleh organisasi pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di Pemerintahan Kabupaten Bima. Penelitian ini menggunakan sampel berjumlah 47 responden dan pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Sampel yang menjadi data dalam penelitian ini adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bekerja di bagian kasubbag, bendahara, Staf Keuangan, dan kepala bagian tata usaha atau sekretaris di 6 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bima. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi (SAP) dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh parsial pengaruhnya terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan hasil dari penelitiannya menunjukkan pengaruh terhadap Penerapan Akuntansi Pemerintah (SAP) dan kualitas Aparatur Pemerintah Daerah secara simultan pengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bima.

3. **Abjan and Abubakar (2018)** melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate” penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan pengaruh kualitas aparatur laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Kota Ternate. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif menggunakan data primer dengan menggunakan

metode pengambilan sampel yaitu menggunakan kuesioner agar diperoleh data yang relevan, dapat dipercaya, obyektif dan dapat dijadikan landasan dalam proses analisis dan populasi penelitiannya adalah pegawai Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kota Ternate. Sedangkan pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel atas dasar pertimbangan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan hasil penelitian kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ternate.

4. **Maulana M . (2021)** melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka) penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem akuntansi pemerintahan terhadap akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan, dan pengaruh good governance (tata kelola) yang baik terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan jenis data penelitian ini adalah data primer diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden

di lokasi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis verifikatif dan penelitian ini, yang menjadi populasinya sebanyak 32 responden pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Majalengka. Sedangkan pengambilan sampel dan responden dilakukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan, sistem akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan good governance (tata kelola) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Majalengka.

5. **Maramis, Morasa, and Wokas (2018)** Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado” penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan good governance dan akuntansi keuangan daerah sistem terhadap kualitas laporan keuangan SKPD. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu dengan menggunakan 2 data, yaitu data primer dan sekunder. Jenis penelitian ini menggunakan cara membagikan kuesioner dan melakukan perhitungan menggunakan aplikasi untuk mengevaluasi penerapan good governance dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan.

Populasi yang digunakan penelitian ini pegawai dibagian keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Manado dan sampel penelitian ini adalah 40 orang pegawai dibagian keuangan yang diambil dari 10 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Manado. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa good governance (tata kelola) mempunyai pengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Manado sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan tidak mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Manado.

6. **Azlim, Darwanis, and Bakar . (2012)** melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh” penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Metode penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan jenis penelitian ini menggunakan kuesioner yang diberikan secara langsung kepada responden dengan menggunakan item-item pertanyaan yang telah dibatasi dalam pemberian jawaban. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh institusi/lembaga yang meliputi kantor, dinas dan badan pada Pemerintah Kota Banda Aceh dan sampel penelitian ini terdiri dari 26 SKPD dan untuk masing-masing SKPD akan dijadikan responden sebanyak 3 orang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa variabel

penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.

7. (Wildah Fighiani Utami, Dien Noviany Rahmatika (2022)

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan, dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal” penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan berbasis akrual. Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dan populasi yang digunakan total keseluruhan kelompok yang kriterianya sesuai untuk dijadikan objek penelitian yaitu Kabupaten Brebes dan 3 SKPD Kota Tegal dan sampelnya ditentukan dengan teknik purposive sampling dengan responden sebanyak 45 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance berpengaruh positif terhadap laporan keuangan berbasis akrual sedangkan Kualitas Aparatur Pemerintah tidak berpengaruh positif

terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal.

8. **Warliana, Syafina, and Hermain (2023)** melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Psap Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keuangan Kota Medan” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Medan dan kualitas aparatur pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dan data primer dengan pengambilan data menggunakan metode Accidental Sampling dan sampel sebanyak 38 responden. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara menyebarkan kuesioner pada satuan kerja perangkat daerah pemerintahan kota medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan dari hasil yang diteliti maka menghasilkan kejelasan terhadap standar akuntansi pemerintahan yang dipakai memberikan hasil laporan keuangan yang berkualitas, sehingga standar akuntansi pemerintahan menjadi acuan dalam mengambil keputusan terhadap laporan keuangan di kota medan, dan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa penerapan dan kualitas aparatur pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dengan harapan organisasi terhadap aparatur pemerintahan yang tinggi

terhadap aparatur pemerintah yang secara aktif berpartisipasi dalam manajemen organisasi dalam prose pengambilan keputusan.

9. **Dalimunthe (2021)** Melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Terhadap Keuangan Pada Kantor Camat Pamatang Silima Kota Kab. Simalungan” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara parsial dan simultan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dan data primer, teknik yang digunakan adalah regresi linear berganda. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang telah diisi oleh responde. Populasi pada penelitian ini seluruh karyawan yang ada di kantor camat pamatang silima kuta kab. Simalungan yaitu sebanyak 70 orang dan sampel yang diperoleh dari penelitian ini sebanyak 32 karyawan, dimana peneliti telah membagikan 35 kuesioner kepada responden di kantor camat pamatang silima kuta kab. Simalungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah sedangkan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh dan tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini secara simultan standar akuntansi

pemerintah dan kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

10. AgustiningTyas, Tyasari, and Yogivaria (2020) melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada Opd Kota Malang” Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menjelaskan good governance, sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang. Penelitian ini menggunakan kuantitatif dan jenis data primer dan teknik yang digunakan dalam sampel ini adalah purposive sampling dengan responden sebanyak 28 OPD Kota Malang dan responden yang dikumpulkan 146 orang dan teknik pengumpulan data dengan cara membagikan kuesioner dan studi pustaka. Maka dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa good governace dan sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sedangkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang.

11. (Aisiah *et al.*, 2018) Melakukan penelitian “**Effect of Application of Good Governance, Government Accounting Standards and Apparatus on Quality of Financial Statements**” bertujuan untuk membuktikan empiris mengenai pengaruh penerapan good governance, penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan kualitas aparatur pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Perbedaan	Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Rachmawati and Anik (2020)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang).	Objek penelitiannya di Kantor Dispenduk Kabupaten Belu	Sama-sama menggunakan Penerapan Standar Akuntansi, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good Governance terhadap kualitas laporan keuangan Pemda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen SAP berpengaruh positif signifikan terhadap laporan keuangan, hasil penelitian dari kualitas aparatur pemerintah daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan hasil penelitian good governance berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan hasil penelitian pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan

					keuangan.
2.	Safitri Nur Ramadhani, Mahsuni Wahid Abdul (2020)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Bima NTB)	Objek penelitiannya di Kantor Dipenduk Kabupaten Belu	Sama-sama membahas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kualitas Laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah mempunyai pengaruh parsial terhadap kualitas laporan keuangan dan hasil penelitiannya menunjukkan pengaruh terhadap Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah secara simultan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Bima.
3.	Abjan and Abubakar (2018)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Ternate	Objek penelitiannya di Kantor Dipenduk Kabupaten Belu	Sama-sama membahas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, dan Kualitas Laporan keuangan terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan hasil penelitian kualitas laporan aparatur pemerintah daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ternate.
4.	Maulana M . (2021)	Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian	Objek penelitiannya di Kantor Dipenduk Kabupaten	Sama-sama membahas tentang Good Governance terhadap kualitas laporan keuangan	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi pemerintahan, sistem

		Intern dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka)	Belu		pengendalian internal, dan good governance (tata kelola) berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Majalengka.
5.	Maramis, Morasa, and Wokas (2018)	Pengaruh Penerapan Good Governance dan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Manado	Objek penelitiannya di Kantor Dispenduk Kabupaten Belu	Sama-sama membahas tentang Good Governance terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa good governance (tata kelola) mempunyai pengaruh pada Kualitas Laporan Keuangan pada Pemerintah Kota Manado, sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan tidak mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kota Manado.
6.	Azlim, Darwanis, and Bakar . (2012)	Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Informasi Keuangan SKPD di Kota Banda Aceh	Objek penelitiannya di Kantor Dispenduk Kabupaten Belu	Sama-sama membahas tentang Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Aceh, sedangkan hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa Penerapan Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Aceh.

7.	(Wildah Fighiani Utami, Dien Noviany Rahmatika (2022)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintahan, dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal	Objek penelitiannya di Kantor Dispenduk Kabupaten Belu	Sama-sama membahas tentang Penerapan Standar Akuntansi, Kualitas Aparatur Pemerintahan, dan Good Governance terhadap kualitas laporan keuangan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi dan Good Governance berpengaruh secara positif terhadap laporan keuangan berbasis akrual, sedangkan Kualitas Aparatur Pemerintah tidak berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes dan Kota Tegal.
8.	Warliana, Syafina, and Hermain (2023)	Pengaruh Psap Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Laporan Keuangan Kota Medan	Objek penelitiannya di Kantor Dispenduk Kabupaten Belu	Sama-sama menggunakan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh dan tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini secara simultan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
9.	Dalimunthe (2021)	Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Terhadap Keuangan Pada	Objek penelitiannya di Kantor Dispenduk Kabupaten Belu	Sama-sama membahas Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah,

		Kantor Camat Pamatang Silima Kota Kab. Simalungan			sedangkan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh dan tidak signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini secara simultan Standar Akuntansi Pemerintah dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.
10.	Agustining Tyas, Tyasari, and Yogivaria (2020)	Pengaruh Good Governance, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pada Opd Kota Malang	Objek penelitiannya di Kantor Dispenduk Kabupaten Belu	Sama-sama membaca tentang Pengaruh Good Governance terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Maka dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Good Governance dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), sedangkan Kompetensi Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang.
11.	(Aisiah <i>et al.</i> , 2018)	“Effect of Application of Good Governance, Government Accounting Standards and Apparatus on Quality of Financial Statements”	Objek penelitiannya di Kabuapten Organisa si Perangkat Daerah (OPD)	Sama-sam mebahas tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kualitas aparatur pemerintahan daerah dan good governance terhadap kualitas laporan keuangan.	Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan empiris mengenai pengaruh penerapan good governance, standar akuntansi pemerintahan (SAP), dan kualitas aparatur pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten bandung. Penelitian ini

					menggunakan metode analisis regresi linear berganda dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga variabel ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
--	--	--	--	--	--

Sumber : Rachmawati A.(2020), Safitri,dkk (2020), Abjan A. (2018), Maulana M. (2021), Maramis,dkk (2018), Azlim,dkk (2012),Wildah Fighiani Utami,dkk (2022), Warliana,dkk (2023), Darlimunthe (2021), Agustining Tyas,dkk (2020), Aisiah *et al.*, (2018)

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

2.2.1.1 Pengerian Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan hasil dari Undang-Undang Nomor 71 tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan diterapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah sebelumnya telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut masih menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan,

belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sangat diperlukan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD yang mencakup Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan Pemerintah ini merupakan bentuk implementasi dari Pasal 184 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengamanatkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Adapun definisi menurut (Mardiasmo, 2009) Standar akuntansi sektor publik adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan organisasi sektor publik. Pemerintahan Indonesia sudah menetapkan standar akuntansi untuk pemerintahan yang disebut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Standar Akuntansi ini dinyatakan dalam bentuk pernyataan standar akuntansi sektor publik yang memuat rumusan secara terperinci elemen-elemen standar akuntansi. Standar Akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan dan prosedur akuntansi merupakan praktik khusus yang telah digunakan untuk mengimplementasikan standar.

Menurut (Mahmudi, 2010) mengatakan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan ditetapkannya SAP, diharapkan dapat terciptanya transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan mengacu pada prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) maupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

2.2.1.2 Manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut Yoyo Sudaryo, Devyanthi Sjarif, dan Nunung Ayu Sofiaty (2021) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) diberlakukan dalam pemerintahan, mencakup pemerintah pusat dan kementerian, serta pemerintah daerah dan dinas-dinas terkait lainnya. Implementasi SAP diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di tingkat pusat maupun daerah dengan demikian informasi keuangan pemerintah dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan serta mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

Manfaat yang dapat diperoleh dengan adanya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah laporan keuangan yang dihasilkan dapat memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur, dan menyeluruh kepada stakeholders. Selain itu, dalam lingkup manajemen dapat memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah.

Menurut (Mahmudi, 2010) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan seperangkat prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan ini memberikan berbagai manfaat, diantaranya sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman Audit, SAP digunakan oleh auditor sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan untuk menilai apakah laporan keuangan yang disajikan telah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum.
2. Sebagai Acuan bagi Pengguna Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan ini membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami isi laporan dan menghindari kesalahan dalam menafsirkan informasi yang terkandung didalamnya.
3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan, Penerapan SAP ini membantu pengguna laporan keuangan dengan memastikan adanya konsisten, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan dalam penyajiannya.
4. Sebagai Dasar dalam Pengembangan Sistem Akuntansi, SAP digunakan sebagai pedoman dalam perancangan sistem akuntansi, sehingga keluaran dari sistem tersebut sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah mempunyai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku. Berikut ini adalah Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)

sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, yaitu:

1. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan.
2. Pernyataan Stanada Akuntansi Pemerintah Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran.
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas.
4. Peranyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan.
5. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan.
6. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 06 tentang Akuntansi Inverstasi.
7. Peranyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Aktiva Tetap.
8. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 08 tentang Konstruksi Dalam Pengerjaan.
9. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban.
10. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa.

11. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian.
12. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 12 tentang Laporan Operasional.

2.2.1.3 Indikator Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Menurut penelitian Rachman, Sofwan, and Amelia (2023) mengutip dari buku Indra Bastian (2010) terdapat 3 (tiga) indikator utama dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai berikut:

1. Regulasi, adanya peraturan dan kebijakan yang mendukung Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah.
2. Sumber Daya Manusia, ketersediaan tenaga profesional yang kompeten dan memahami prinsip-prinsip akuntansi pemerintahan.
3. Sistem dan Sarana Pendukung, tersedianya sistem informasi akuntansi serta infrastruktur yang memadai untuk mendukung proses akuntansi dan pelaporan keuangan.

2.2.1.4 Tujuan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) bertujuan untuk memperkuat akuntabilitas serta meningkatkan keandalan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Selain itu, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) juga ditujukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang terpercaya dan diakui secara luas.

Maka menurut (Mardiasmo, 2009) tujuan diterapkannya Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas

Penerapan Standar Akuntansi bertujuan untuk memperkuat transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik dengan adanya pedoman yang jelas maka masyarakat dapat lebih mudah memahami serta mengawasi penggunaan dana publik.

2. Menyediakan Informasi Keuangan yang Akurat dan Relevan

Standar Akuntansi dirancang untuk menyajikan informasi keuangan yang akurat dan relevan bagi para pengambil kebijakan sehingga dapat mendukung proses perencanaan serta penyusunan anggaran yang lebih efektif.

3. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan

Penerapan Standar Akuntansi diharapkan dapat menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang lebih berkualitas sehingga mencerminkan kondisi keuangan secara lebih transparan dan akurat.

4. Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Secara Efisien

Dengan adanya standar akuntansi, pengelolaan keuangan dapat dilakukan secara lebih efisien dan mengurangi potensi pemborosan serta meningkatkan efektivitas dalam penggunaan anggaran.

5. Mempermudah Audit dan Pengawasan

Penerapan Standar Akuntansi memudahkan proses audit serta pengawasan oleh lembaga yang terkait sehingga dapat memastikan

bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Mendukung Pengambilan Keputusan Berbasis Data

Informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan yang disusun sesuai standar lebih dapat dipercaya sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang berbasis data.

2.2.2 Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

2.2.2.1 Pengertian Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 disahkan oleh (Presiden Republik Indonesia, 2023) Aparatur pemerintah daerah atau dikatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sudah bekerja pada instansi pemerintah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dapat diukur dari kompetensi dan integritas yang dimiliki oleh pegawai pemerintahan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai dan kualitas aparatur pemerintah daerah ini mencerminkan sejauhmana aparatur pemerintah dapat menjalankan dan memberikan pelayanan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel kepada

masyarakat yang baik dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah dan kualitas pelayanan publik.

2.2.2.2 Indikator Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah

Menurut Sedarmayanti (Sedarmayanti 2009-94) indikator dalam kualitas aparatur pemerintah daerah meliputi:

1. Kompetensi

Aparatur pemerintah harus memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

2. Kinerja

Kualitas kinerja yang dimiliki aparatur dapat diukur melalui pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dari kinerjanya yang baik dapat mencerminkan efektivitas dalam menjalankan fungsi pemerintahan.

3. Etika dan Integritas

Aparatur pemerintah harus memiliki etika kerja yang tinggi penting untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa pelayanan yang diberikan adalah transparan dan akuntabel.

4. Responsivitas

Kemampuan aparatur untuk merespon kebutuhan dan harapan masyarakat dengan cepat dan tepat agar responsivitas ini mencakup kemampuan untuk mendengarkan masukan dari masyarakat dan dapat menindaklanjutinya.

5. Inovasi

Aparatur diharapkan mampu berinovasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan inovasi ini dapat berupa pengembangan metode baru, penggunaan teknologi serta peningkatan proses kerja.

6. Kepuasan Masyarakat

Indikator ini mengukur sejauhmana masyarakat merasa puas dengan pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah dan survei kepuasan masyarakat sering digunakan menilai aspek ini.

2.2.3 Good Governance

2.2.3.1 Pengertian Good Governance

Good Governance adalah konsep penyelenggaraan pemerintahan yang baik, prinsip demokrasi yang menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pemerintahan perlu diterapkan secara nyata (Mesdila, Hasan and Anggarani, 2025) Menurut Mardiasmo (2018:23) mengatakan bahwa Good Governance dapat diartikan sebagai mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan negara tersebut berdasarkan pada prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. Pemerintahan yang baik atau Good Governance merupakan konsep yang bersifat kolektif yang melibatkan seluruh tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai

bagus dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian Good Governance tidak sebatas pengelolaan lembaga pemerintahan, tetapi menyangkut semua lembaga baik pemerintah maupun non pemerintah.

2.2.3.2 Tujuan Good Governance

Tujuan Good Governance adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembentukan pemerintahan yang kuat, pasar yang bersaing secara sehat, serta sipil masyarakat yang mandiri. Menurut FCGI dalam buku (Reydonnazar Moenek, 2019) tata kelola yang baik bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan serta memastikan tercapainya sasaran perusahaan dan perlindungan asetnya. Selain itu, tata kelola yang baik fokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya organisasi agar selaras dengan tujuan yang telah ditetapkan. Good Governance bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membangun pemerintahan yang kuat, dan mendorong kemandirian masyarakat sipil.

2.2.3.3 Indikator Good Governance

Menurut indikator (Sedarmayanti, 2004) Good Governance adalah : Partisipasi (*participation*), Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*accountability*), Efektivitas (*effectiveness*), Penegakan Hukum (*law enforcement*). Berikut ini adalah penjelasan dari Cara pengukuran atau indikator diatas:

1. Partisipasi (*Participation*) mengacu pada hak yang setara bagi setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan keterlibatan ini dapat dilakukan secara

langsung maupun melalui perwakilan sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing.

2. Transparansi (*Transparency*) pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya, baik ditingkat pusat maupun daerah dan menekankan pentingnya kebebasan dalam penyebaran informasi terkait berbagai proses dan kelembagaan. Informasi harus tersedia secara terbuka bagi siapa saja yang membutuhkannya, disajikan dengan jelas, serta mudah dipahami agar dapat digunakan untuk pemantauan dan evaluasi.
3. Akuntabilitas (*Accountability*) berarti bahwa setiap pengambilan keputusan dalam organisasi pelayanan publik maupun masyarakat harus bertanggung jawab kepada publik dan pemangku kepentingan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut dapat berbeda, tergantung pada jenis keputusan yang diambil, baik dalam lingkup internal maupun eksternal organisasi.
4. Efektivitas (*Effectiveness*) mengacu pada bagaimana suatu proses dan institusi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal.
5. Penegak Hukum (*Law Eforcement*) menegaskan bahwa hukum harus diterapkan secara adil dan tanpa diskriminasi, terutama melindungi hak asasi manusia serta dalam menangani kasus yang dapat merugikan negara

2.2.4 Kualitas Laporan Keuangan

2.2.4.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan merupakan aspek fundamental dalam sistem pelaporan keuangan organisasi karena mencerminkan kinerja dan posisi keuangan suatu entitas selama periode tertentu (Wahtan, Hayat and Sumarni, 2025) Dalam peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dijelaskan bahwa kualitas laporan keuangan dilihat dari karakteristik kualitatif yang dimiliki oleh laporan keuangan dan bagi pemerintah menyajikan laporan keuangan yang berkualitas merupakan sebuah keharusan.

Kualitas laporan keuangan merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai atau mengukur hasil dari proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi yang mencerminkan aktivitas keuangan suatu entitas akuntansi dalam pemerintahan daerah. Laporan ini berfungsi sebagai sumber informasi untuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan serta sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

2.2.4.2 Indikator Kualitas Laporan Keuangan

Menurut PP No. 71 2010, kualitatif laporan keuangan dapat memenuhi karakteristik kualitatif apabila memenuhi syarat terdiri atas:

1. Relevan

Laporan keuangan pemerintah daerah harus memuat informasi yang sesuai dengan tujuan penggunaannya. Hal ini mencakup beberapa:

- a. Informasi dalam laporan keuangan dapat membantu pengguna dalam mencatat atau mengukur harapan mereka terkait data keuangan (feedback value).
- b. Laporan keuangan menyajikan data yang berguna bagi pengguna dalam memprediksi kondisi dimasa yang mendatang (predictive value).
- c. Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu (timelines) agar tetap memiliki dampak dan manfaat dalam pengambilan keputusan oleh pengguna laporan keuangan.
- d. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus selengkap mungkin (completeness) agar seluruh aspek akuntansi yang dapat mempengaruhi keputusan pengguna dapat tercakup.

2. Andal

Laporan keuangan pemerintah daerah harus bebas dari informasi yang menyesatkan atau kesalahan material dan informasi harus disajikan dengan jujur, dapat ditayangkan dan netral.

3. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya atau laporan keuangan daerah lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan harus konsisten. Jika ada perubahan kebijakan, maka perubahan tersebut harus diungkapkan pada periode saat perubahan terjadi.

4. Dapat Dipahami

Informasi dalam laporan keuangan harus disajikan dalam format dan istilah yang mudah dipahami oleh pengguna, sesuai dengan tingkat pemahaman mereka.

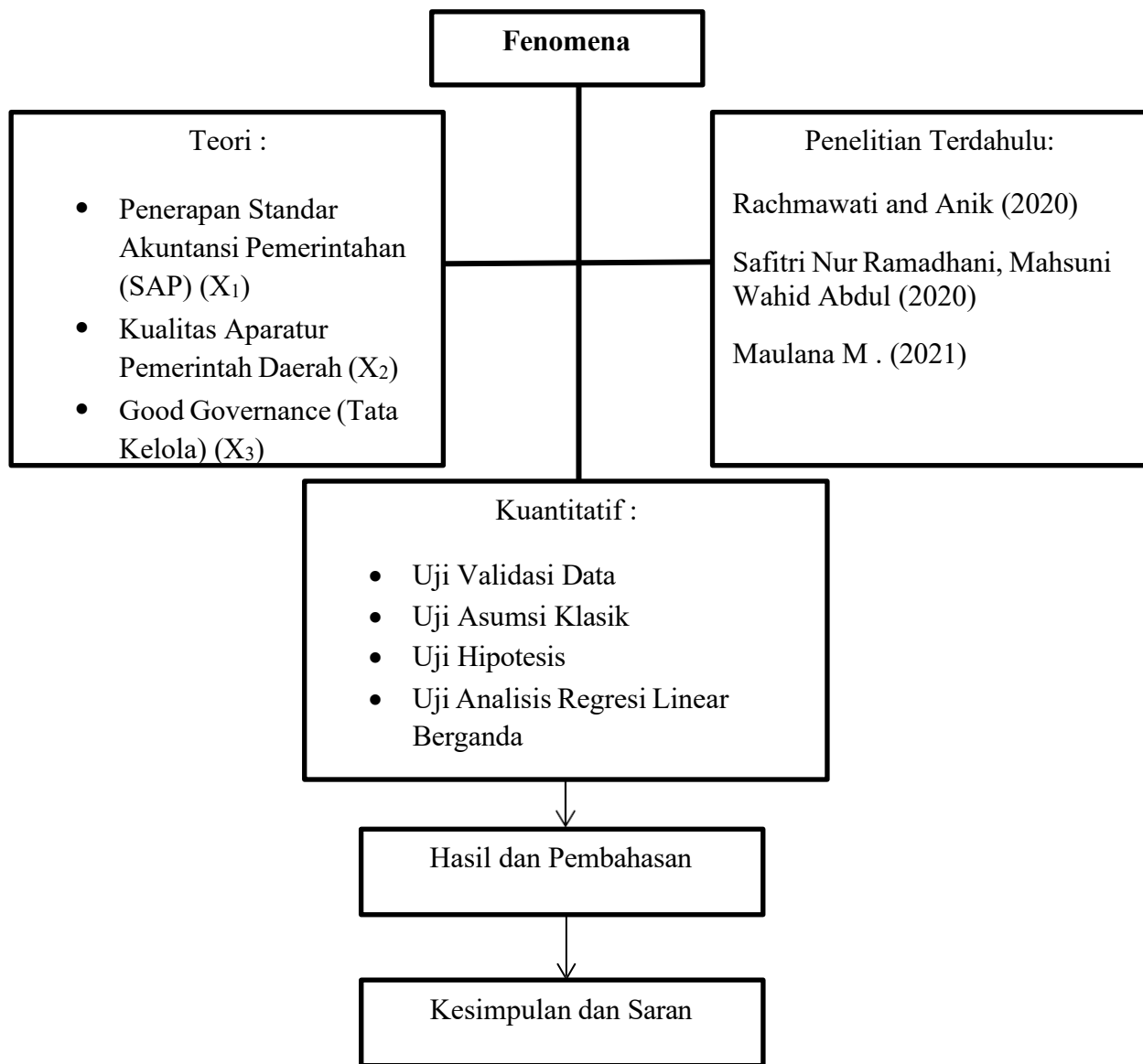
2.3 Kerangka Pikir Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel terikat yaitu kualitas laporan keuangan dengan variabel bebasnya yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, kualitas aparatur pemerintah daerah dan good governance. Berdasarkan latar belakang diatas, bahwa peningkatan kualitas laporan keuangan daerah dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas, meningkatkan kualitas aparatur pemerintah daerah serta good governance.

Penerapan standar akuntansi pemerintahan mewajibkan setiap pelaporan, dalam hal ini termasuk pemerintah daerah untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan. Dan kualitas laporan keuangan menjadi persyaratan yang sesuai dengan peraturan dan perlu diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna sebagai bahan pengambilan keputusan.

Kualitas aparatur pemerintah daerah dan good governance berperan dalam memastikan bahwa kualitas laporan keuangan dapat disusun dengan baik dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah yang berkualitas dengan menitikberatkan pada proses pengelolaan keuangan.

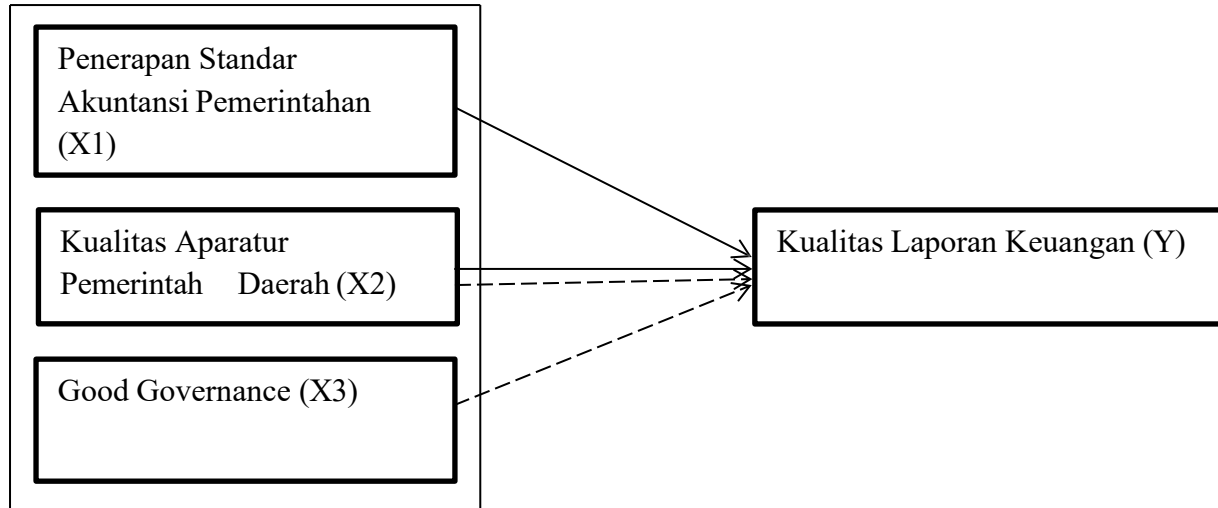
Gambar 2. 1 Kerangka Pikir Peneliti



Sumber: Diolah Peneliti, 2025

2.4 Kerangka Konseptual

Gambar 2. 2 Model Konseptual



Sumber: Disusun Oleh Peneliti 2025

Keterangan:

X1 = Variabel Independen 1, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah.

X2 = Variabel Independen 2, Kualitas Aparatur Pemerintahan Daerah.

X3 = Variabel Independen 3, Good Governance.

Y = Variabel Dependen Kualitas Laporan Keuangan.

-----> = Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Secara Parsial

————> = Pengaruh Variabel Independen terhadap Variabel Dependen Secara Simultan

Pada gambar diatas, bariabel Y merupakan variabel dependen (terikat), yaitu variabel yang dipengaruhi atau muncul sebagai akibat dari adanya variabel X, yaitu variabel independen (bebas) yang memberikan pengaruh atau menjadi penyebab terjadinya perubahan pada variabel dependen. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perkembangan veriabel Y.

2.5 Hipotesis

Menurut Sugiyono yang diambil dari bukunya (Hardani 2020:329), Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan dan hipotesis seringkali dikatakan hasil penelitian sementara karena jawaban yang diberikan hanya berdasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

2.5.1. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan hasil dari Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan yang independen dan diterapkan dengan Peraturan Pemerintah setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) merupakan standar yang dibuat agar pemerintah memiliki gambaran mengenai kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan daerahnya. Laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah sesuai dengan kualitas laporan keuangan menjadi persyaratan yang sesuai dengan peraturan dan perlu diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan agar menghasilkan laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh pengguna sebagai bahan pengambilan keputusan.

Hasil penelitian Warliana, Syafina, and Hermain (2023) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Berbasis Akrua di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, dan Kota Tegal” Hasilnya bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan

H1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.5.2. Penerapan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 disahkan oleh (Presiden Republik Indonesia, 2023) Aparatur pemerintah daerah atau dikatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang sudah bekerja pada instansi pemerintah dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat

pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian (Dumariani Silalahi, 2025) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Laporan Keuangan Perusahaan” hasilnya bahwa berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H2: Penerapan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.5.3. Penerapan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2018:23) mengatakan bahwa Good Governance dapat diartikan sebagai mengelola semua urusan-urusan publik dengan baik. Suatu penyelenggaraan negara yang mengimplementasikan negara tersebut berdasarkan pada prinsip partisipasi, aturan hukum, transparansi, daya tanggap, orientasi pada kepentingan publik, keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis dan saling keterkaitan. Hasil penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” Penelitian (Alvi Angelica Tabupook, 2024) ini mengungkapkan bahwa good governance memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

H3: Penerapan Good Governance Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.5.4. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Simultan adalah pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas jika digabungkan dengan uji F. Ketentuan hipotesis secara simultan adalah jika nilai signifikan $< 0,5$ maka secara simultan kedua variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Apabila nilai signifikan $< 0,5$ maka secara simultan kedua variabel independen mempunyai pengaruh yang sama signifikan terhadap variabel dependen. Menurut penelitian (Advia, Raibbatol, Agus Satrya Wibowo, and M. Ichsan Diarsyad. 2023) dengan judul “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Dan Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Dinas Kota Palangka Raya) berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

H4: Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah dan Good Governance Berpengaruh Seacara Simultan Terhadap Kualitas Laporan Keungan